

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus Pagar Laut Tangerang mencuat pada Agustus 2024 ketika masyarakat dan pemerintah menemukan ada pagar laut sepanjang 7 kilometer di perairan utara Kab. Tangerang (Syahrial, 2025). Pagar Laut Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 km di wilayah laut Kab. Tangerang, Banten, teridentifikasi dalam hal ini (Pratiwi, 2025). Fakta ini memperkuat dugaan bahwa praktik penguasaan laut dilakukan secara sepihak, tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun otoritas kelautan.

Sejak peristiwa itu terjadi, di 9 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan langkah penyegelan pada pagar laut yang dipermasalahkan. Langkah ini diambil karena terdapat dugaan bahwa pembangunan pagar tersebut belum mengantongi izin resmi berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta ada di kawasan yang diperuntukkan bagi aktivitas perikanan tangkap dan pengelolaan energi (Maulana I. A., 2025).

Sejak penyegelan pagar laut tersebut TNI Angkatan Laut bersama para nelayan, proses pembongkaran pagar laut dimulai berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan 600 personel gabungan dari berbagai instansi. Meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, sempat mengusulkan penundaan sementara guna mendukung proses penyelidikan lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwasanya pembongkaran tetap dilaksanakan sesuai instruksi presiden. (Carina F. N., 2025).

Dari hasil investigasi ditemukan bahwa sejumlah wilayah yang telah dipasang pagar ternyata diketahui telah terdaftar dengan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) serta Sertifikat Hak Milik (SHM). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membenarkan keberadaan sertifikat-surat tersebut dan menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut

terkait proses penerbitannya. (Adhi, 2025). Sampai saat ini, proses investigasi dan pembongkaran pagar laut masih terus berjalan, dengan berbagai pihak yang terlibat berupaya mengungkap pihak yang diduga menjadi pelaksana pembangunan pagar laut yang belum jelas asal-usulnya (Bustomi, 2025).

Kehadiran Pagar Laut di Wilayah Pesisir Utara Kab. Tangerang telah menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya., terutama komunitas nelayan. Struktur bambu sepanjang 30,16 km ini menghambat akses nelayan ke area penangkapan ikan, menyebabkan peningkatan biaya operasional, serta menurunkan produktivitas (Farisa, 2025). Menurut kajian yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Banten, terdapat sekitar 3.888 nelayan serta 502 pelaku usaha budidaya yang mengalami dampak akibat kondisi tersebut. secara harfiah, yang jika dihitung bersama anggota keluarga mereka, jumlahnya mencapai sekitar 21.950 jiwa (Bustomi, 2025).

- Selain dampak terhadap perekonomian, pemasangan pagar laut juga berdampak negatif pada lingkungan. Keberadaannya menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengganggu habitat biota laut, serta meningkatkan risiko banjir akibat terganggunya aliran sungai. Polemik ini mencerminkan ketimpangan antara kepentingan masyarakat kecil dan dominasi modal, sekaligus menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir (Gatra, 2025).

Berbagai pihak turut turun tangan dalam menangani permasalahan ini, Salah satunya yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang mendesak pemerintah agar segera melakukan pembongkaran pagar laut dan memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam pembangunannya. Sementara itu, Fadli Afriadi, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, menyampaikan bahwa selama periode Agustus 2024 hingga Januari 2025, kurang lebih 3.888 nelayan terdampak secara ekonomi akibat keberadaan pagar laut di wilayah perairan Tanjung Pasir, Kab. Tangerang, dengan estimasi kerugian yang mencapai sekitar Rp 24 miliar. (Mukti, 2025).

Hingga kini, permasalahan terkait Pagar Laut Tangerang masih menjadi sorotan publik. Sementara itu, KKP telah mengambil langkah penutupan akses terhadap struktur pagar laut di wilayah perairan Tangerang dilakukan karena tidak dilengkapi izin resmi serta dianggap bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan

ruang laut yang berlaku. Merespons perdebatan pada isu ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan evaluasi terhadap seluruh proyek strategis nasional, termasuk proyek pagar laut (Carina F. N., 2025). Namun demikian, kasus ini menyentuh tiga aspek krusial yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi legalitas pemanfaatan ruang laut, keberadaan pagar yang dibangun di wilayah pesisir tanpa izin resmi melanggar prinsip tata kelola kelautan. KKP telah melaksanakan penyegelan terhadap pagar laut tersebut sebab tidak mengantongi dokumen KKPRL, yang menjadi persyaratan utama dalam penggunaan kawasan perairan untuk keperluan pembangunan maupun kegiatan komersial. Tindakan ini menunjukkan bahwa proyek-proyek di wilayah pesisir, apakah milik pemerintah atau swasta tidak boleh berjalan tanpa kejelasan legalitas zonasi laut.

Struktur pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kab. Tangerang sudah menimbulkan konflik lingkungan yang signifikan, dengan dampak paling nyata dirasakan oleh komunitas nelayan di wilayah tersebut. (Pristiandaru, 2025). Pagar bambu setinggi enam meter tersebut membatasi akses nelayan ke area tangkapan ikan, memaksa mereka menempuh rute lebih jauh yang berakibat pada peningkatan biaya operasional. Kondisi ini mencerminkan benturan antara kepentingan publik dan swasta, yang pada akhirnya merugikan masyarakat kecil (Carina F. N., 2025). Selain dampak sosial dan ekonomi, pembangunan pagar laut tanpa izin juga menimbulkan kekhawatiran terkait kerusakan ekosistem laut. Para ahli lingkungan menilai bahwa keberadaan pagar ini berpotensi mengganggu habitat biota laut serta mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir (Pristiandaru, 2025).

Perkara ini juga membuka fakta mengenai terbitnya SHGB serta SHM di kawasan perairan industri, yang sejatinya tidak diperuntukkan untuk kepemilikan individu atau privat. Pemerintah mengidentifikasi 263 SHGB dan 17 SHM yang mencakup lebih dari 410 hektare di sekitar wilayah pagar laut Desa Kohod, Pakuhaji, Kab. Tangerang (Djumena, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait legalitas kepemilikan lahan di kawasan pesisir serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan sertifikat tersebut. Secara keseluruhan, konflik ini memperlihatkan ketegangan antara dominasi modal dan

hak masyarakat lokal, sekaligus menegaskan perlunya transparansi serta penegakan hukum yang lebih tegas dalam pengelolaan wilayah pesisir (Maulana, 2025).

Adanya Kasus Pagar Laut Tangerang ini menjadi fokus pemberitaan intensif oleh media massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional. (Fauziah, 2020) menegaskan bahwa aspek kedekatan geografis dalam pemberitaan yang menjelaskan bahwa nilai berita (*proximity*) masih menjadi pertimbangan utama dalam penentuan berita utama oleh media daring. Di wilayah Provinsi Banten, sejumlah media lokal seperti Radarbanten.co.id, Banten Pos, dan Beritabanten.com diketahui aktif dalam menyampaikan berbagai isu yang berkembang di daerah. Sedari Beritabanten.com belum tercatat sebagai media yang telah lolos verifikasi administratif maupun faktual oleh Dewan Pers (Dewan Pers, n.d.).

Media Beritabanten.com menunjukkan konsistensi dalam melaporkan isu-isu lokal (Beritabanten, n.d.), termasuk kasus Pagar Laut di Kawasan Pesisir Tangerang. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini menjadikan Beritabanten.com sebagai perwakilan media lokal Banten untuk dianalisis dan dibandingkan dengan Kompas.com sebagai media nasional dalam mengkaji pembingkai berita mengenai pembangunan Pagar Laut Tangerang, menggunakan model *framing* Pan & Kosicki untuk periode Januari hingga Februari 2025.

Dalam penelitian ini, pemilihan BeritaBanten.com sebagai objek media lokal dilakukan secara sengaja untuk menghindari afiliasi struktural dengan media nasional seperti Kompas.com. Berbeda dengan RadarBanten yang merupakan bagian dari jaringan Jawa Pos Group yang sama-sama berada dalam lingkup media korporasi besar. Hal ini berpotensi menciptakan homogenitas dalam gaya pemberitaan dan *framing* isu, yang dapat memengaruhi objektivitas dalam analisis komparatif. Atas hal ini, media BeritaBanten.com hadir menjadi media lokal independen yang lebih otonom secara redaksional, karena memungkinkan munculnya konstruksi berita yang lebih otentik, kontekstual, dan sesuai dengan realitas masyarakat lokal

Dengan demikian, komparasi antara Kompas.com dan BeritaBanten.com memungkinkan analisis *framing* yang lebih obyektif dan mendalam atas konstruksi Kasus Pagar Laut Tangerang dari perspektif nasional dan lokal yang berbeda secara struktural maupun ideologis. . Selain itu, BeritaBanten.com secara konsisten

memuat berita dan opini tentang Kasus Pagar Laut Tangerang, dengan muatan lokalitas tinggi. Sedangkan, RadarBanten justru memiliki intensitas pemberitaan yang lebih rendah atau lebih variatif pada Kasus Pagar Laut Tangerang.

Dalam pemilihan media nasional seperti Kompas.com dipilih sebagai representasi media nasional karena memiliki jangkauan audiens yang luas, kredibilitas tinggi, serta gaya peliputan yang mendalam dan analitis. Berdasarkan data dari Similarweb 2025, Kompas.com mencatat 69,1 juta kunjungan pada April 2025, menempatkannya di peringkat ketiga dalam kategori situs berita nasional Indonesia, setelah Detik.com dan Tribunnews.com. Selain itu, Kompas.com sudah terverifikasi secara administratif serta faktual oleh Dewan Pers, menunjukkan komitmennya terhadap standar jurnalistik yang kredibel.

Berbeda dari media seperti Detik.com yang cenderung menyajikan informasi secara singkat, Kompas.com dikenal dengan pendekatan pemberitaan yang lebih analitis dan kontekstual, menjadikannya relevan untuk dianalisis menggunakan model *framing* Pan & Kosicki. Media ini juga secara konsisten mempublikasikan laporan mengenai isu lingkungan dan pembangunan infrastruktur, termasuk terkait kasus pagar laut Tangerang pada periode Januari–Februari 2025. Selain mudah diakses, data trafik Kompas.com juga tersedia secara terbuka, mendukung kebutuhan dokumentasi dan validasi dalam studi ini.

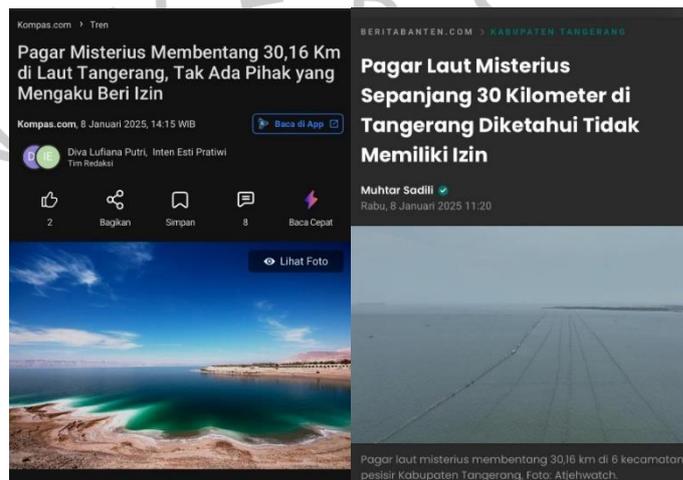
Tabel 1.1. Jumlah Berita Kasus Pagar Laut Tangerang

No	Lokal		Nasional	
	Nama	Σ Berita	Nama	Σ Berita
1	Beritabanten.com	38	Kompas.com	527
2	Banpos.co	5	Detik.com	310
3	Radarbanten.co.id	80	Tribunnews.com	300

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Pada **tabel 1.1** di atas menunjukkan jumlah berita Kasus Pagar Laut Tangerang pada media lokal dan media nasional, yang kemudian menjadi dasar dalam pemilihan berita. Pada pemilihan media lokal, penelitian ini memfokuskan pada Beritabanten.com yang memiliki jumlah berita sebanyak 38 berita dengan pemberitaan yang konsisten dan mengikuti kronologis mendasar terkait Kasus Pagar Laut Tangerang. Sementara itu, untuk media nasional, penelitian ini akan memfokuskan pada Kompas.com yang memuat berita sebanyak 527 berita terkait

kasus ini, sehingga menjadikannya sebagai media nasional dengan jumlah berita terbanyak dibandingkan media nasional lainnya. Adanya jumlah berita ini menunjukkan Kompas.com memiliki dedikasi yang berkelanjutan dalam menyuarakan dan memantau Kasus Pagar Laut Tangerang. Berdasarkan periode unggahan berita, dalam hal ini Kompas.com merupakan media yang paling konsisten dengan mengikuti perkembangan awal kasus ini terjadi.



Gambar 1.1. Berita Kasus Pagar Laut Tangerang (Kompas.com dan Beritabanten.com, 2025)

Pada gambar 1.1 menunjukkan berita Kasus Pagar Laut Tangerang yang ditayangkan oleh media: nasional Kompas.com serta lokal Beritabanten.com. Pada berita berjudul "Pagar Misterius Membentang 30,16 Km di Laut Tangerang, Tak Ada Pihak yang Mengaku Beri Izin", Kompas.com cenderung mengangkat kasus dari sisi masalah kepemilikan dan tanggung jawab otoritas menggunakan bahasa yang lebih provokatif dan menarik perhatian seperti "misterius", dan/atau "tak ada pihak yang mengaku", yang berorientasi pada daya tarik audiens yang luas. Sedangkan, Beritabanten.com cenderung mengangkat persoalan kasus ini dari status hukum fisik pagar laut, tanpa menekankan pada siapa yang bertanggung jawab. Selaras dengan konsep jurnalisme lingkungan, berita Kompas.com menunjukkan dasar utama pada potensi yang merujuk pada pengabaian terhadap regulasi lingkungan. Hal ini sejalan juga dengan membuka diskusi soal pelanggaran hukum lingkungan, potensi kerusakan ekosistem laut, dan minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan soal lingkungan.

Sedangkan, Beritabanten.com merujuk pada aspek hukum dan administratif dalam pembangunan pagar di laut, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap pengabaian dampak ekologis dan kerusakan lingkungan laut yang mungkin tidak dipertimbangkan atau tidak dimitigasi. Dengan adanya kasus tersebut menurut Sudibyo dalam (Fadila, 2024) tujuan jurnalisme lingkungan ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran sosial individu terkait isu lingkungan dengan menyajikan informasi yang relevan. Selain itu, Menurut Sudibyo dalam (Chintya, 2020) mengatakan beberapa aspek yang mendorong ruang lingkup jurnalisme lingkungan dapat mendorong kerusakan lingkungan antara lain meningkatnya laju kerusakan alam, dampak nyata perubahan iklim dan pemanasan global, serta kebijakan pemerintah yang mengeksploitasi sumber daya alam sehingga mengancam keanekaragaman hayati. Dengan itu harusnya jurnalisme lingkungan memfokuskan pada aspek terkait lingkungan dan bukan hanya terkait aspek regulasi dan hukum.

- Perbedaan media Kompas.com dan Beritabanten.com dalam mengangkat kasus pagar laut ini memperlihatkan bahwasanya setiap media mempunyai sudut pandang dan kepentingan tertentu dalam menyampaikan informasi kepada publik. Perbedaan penyajian kedua media menunjukkan kepentingan yang berbeda untuk mengangkat kasus ini. Selaras dengan pendapat (Eriyanto, 2018) Analisis *framing* ialah pendekatan yang dipergunakan guna menelusuri bagaimana media mengonstruksi serta membingkai realitas sosial melalui cara mereka menyajikan informasi dalam pemberitaan. Hal ini juga sejalan dengan hasil konstruksi realitas yang melibatkan persepsi dari penulisnya, yaitu wartawan dan ideologi yang dimiliki oleh media itu sendiri (Eriyanto, 2018). Dalam hal ini terlihat bagaimana media tidak hanya memberi informasi, tetapi juga dapat mengarahkan persepsi publik dalam memahami suatu realitas.

Dalam hal ini, Zhongdang Pan serta Gerald Kosicki dalam (Taimiyah, 2020) melihat *framing* menjadi proses konstruksi berita yang dipengaruhi oleh rutinitas kerja media. Pada konteks ini, tiap berita yang dikemas merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh jurnalis yang memiliki kepentingan dalam mengungkap suatu berita untuk mengarahkan publik dalam menafsirkan berita tersebut. Sedangkan pada model *framing* Entman dalam (Setiawan, 2023) digunakan sebagai kerangka pelengkap untuk menilai fungsi *framing* secara makro yakni, bagaimana

media mengartikan masalah, mengevaluasi penyebab, memberikan penilaian moral, serta menyarankan solusi. Dengan kombinasi ini, penelitian mampu mengungkap tidak hanya “bagaimana” berita dikonstruksi, tetapi juga “apa” tujuan pesan yang ingin disampaikan oleh masing-masing media.”

Sejalan dengan permasalahan yang disampaikan di bagian latar belakang, kajian ini hendak mengungkap Bagaimana Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Kasus Pagar Laut Tangerang Pada Media Daring Kompas.com serta Beritabanten.com Periode Januari – Februari 2025. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana berita dikemas oleh dua media yang berbeda melalui analisis *framing* model Zhongdang Pan serta Gerald Kosicki dengan melalui 4 elemen seperti struktur: sintaksis, skrip, tematik, serta retroris.

Penelitian ini mengkaji pemberitaan terkait kasus pagar laut tangerang di media daring kompas.com serta beritabanten.com dilanjutkan dengan pemilihan periode januari hingga februari 2025. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan seperti TNI AL, Menteri ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Presiden RI ikut serta merespon kasus pagar laut tangerang. Sehingga media dapat mengungkap kasus ini secara terstruktur untuk mengangkat kasus ini secara kronologis. Dalam analisis ini, kata kunci seperti "Pagar Laut Tangerang" sebagai unit analisis di media nasional seperti Kompas.com terdapat 527 berita dan media lokal seperti Beritabanten.com sebanyak 38 berita dalam mengunggah berita. Pemilihan berita diselaraskan dengan kronologis studi ini.

Terkait metode Analisis *Framing* model Pan & Kosicki yang fokus membahas pembingkai pemberitaan di dalam media daring, tersedia sejumlah studi terdahulu atau tinjauan pustaka yang memiliki relevansi untuk mendukung kelangsungan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tristan (2024) dalam *Journal System Portal University of Pembangunan Jaya* berjudul “Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Kasus Hilirisasi Nikel di Media Daring” menjadi salah satu acuan penting dalam studi ini. Penelitian tersebut membandingkan cara Fajar.co.id dan Kompas.com membingkai isu hilirisasi nikel dalam periode Februari 2023 hingga Februari 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung menampilkan judul berita yang bernuansa positif dan optimistis, terutama dalam menyoroti dampak hilirisasi maupun program CSR.

Dalam struktur pemberitaannya, Kompas.com lebih menekankan pada unsur *apa* (*What*) dan banyak menggunakan kutipan dari pihak-pihak yang terlibat langsung seperti pemerintah atau perusahaan. Penggunaan kutipan ini berfungsi untuk memperkuat narasi yang disampaikan dan meningkatkan kredibilitas isi berita, meskipun sudut pandangnya menjadi lebih terbatas karena dominasi sumber resmi.

Penelitian kedua yang dijadikan rujukan berjudul "*Analisis Framing Pan dan Kosicki mengenai Pro Kontra Deforestasi Hutan di Indonesia dalam Bingkai Media Daring Tempo.co dan Detik.com*" oleh M. Abdi Octavianus Hasan dan Doddy Iskandar (2023) dalam *Journal System Portal Universitas Islam Bandung*. Studi ini membahas bagaimana kedua media membingkai isu deforestasi, khususnya setelah pernyataan Menteri LHK, Siti Nurbaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Detik.com serta Tempo.co menyampaikan informasi dengan menyertakan unsur 5W+1H secara umum, meskipun salah satu berita dari Tempo.co kurang lengkap karena tidak mencantumkan unsur lokasi. Keduanya menggunakan gaya bahasa yang mirip dan menekankan aspek penting melalui kata penghubung, serta menampilkan visual berupa foto tokoh atau ilustrasi untuk memperkuat isi berita. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana *framing* dipergunakan guna membentuk persepsi publik pada isu lingkungan tanpa secara eksplisit memihak.

Penelitian ketiga berjudul "*Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan*" oleh Amaliyah (2025) dari Universitas Pamulang dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya pembangunan pagar laut memicu konflik antara pihak pemerintah, pengembang, dan masyarakat setempat, yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan serta pemahaman mengenai pemanfaatan ruang pesisir. Ketegangan ini turut dipengaruhi oleh kesenjangan dalam pendidikan dan tingkat kesadaran lingkungan di antara kelompok-kelompok tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog partisipatif dan peningkatan literasi lingkungan guna meredam konflik serta mendorong pembangunan yang inklusif. Peneliti juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan komunikasi yang efektif, sinergi antar pemangku kepentingan, pendidikan sosial, serta perbaikan kebijakan sebagai upaya penyempurnaan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan studi pustaka, penelitian ini mengkaji isu pagar laut di Tangerang dengan pendekatan kualitatif menerapkan metode analisis *framing* berdasarkan model yang dikembangkan Pan dan Kosicki.

Studi ini memanfaatkan studi pustaka sebagai dasar referensi untuk membantu mengidentifikasi perumusan masalah yang diangkat. Selain itu, kajian ini mempunyai perbedaan tertentu dibandingkan dengan studi sebelumnya yang membahas Kasus Hilirisasi Nikel, Deforestasi Hutan dan Analisis Konflik Pagar Laut Tangerang Selatan. Penelitian ini memfokuskan pada kasus pagar laut tangerang, yang merupakan kehadiran struktur fisik pagar laut di wilayah pesisir dan perairan dangkal berpotensi merusak ekosistem alami yakni padang lamun, terumbu karang, serta hutan mangrove, yang berperan krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut (Tantaru, 2025).

1.2. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang disusun peneliti, maka rumusan masalah yang dipergunakan yakni: “Bagaimana Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Kasus Pagar Laut Tangerang Pada Media Daring Kompas.com dan Beritabanten.com Periode Januari – Februari 2025”.

1.3. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang serta rumusan masalah yang disusun oleh peneliti, maka tujuan penelitian yang dipergunakan yakni mengetahui “Bagaimana Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Kasus Pagar Laut Tangerang Pada Media Daring Kompas.com dan Beritabanten.com Periode Januari – Februari 2025”.

1.4. Manfaat Penelitian

Dimaksudkan dapat memberi manfaat baik dari sisi akademis ataupun praktis, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi dan praktik pemberitaan isu lingkungan.

1.4.1. Manfaat Akademis

Secara akademis, studi ini dapat menambah referensi di kajian *framing*, terkhusus yang berkaitan dengan jurnalisme lingkungan. Studi ini juga dimaksudkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang hendak mengkaji perbedaan pembingkaiian media terhadap isu lingkungan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan studi ini dapat memberi gambaran kepada jurnalis dan media tentang bagaimana cara memberitakan isu lingkungan secara lebih kritis, adil, dan informatif. Di sisi lain, studi ini juga bisa menjadi masukan bagi masyarakat dan pihak terkait untuk lebih memahami bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap persoalan lingkungan, khususnya dalam kasus pagar laut di Tangerang.

